

Analisis Kontribusi Legislator Hindu Terhadap Pendidikan Agama Hindu Di Kabupaten Lampung Tengah

Oleh:

Teguh Samiadi¹, Kadek Dwi Septiana²

stahlampung@yahoo.co.id

Sekolah Tinggi Agama Hindhu Lampung

Abstrak: Perkembangan pendidikan Agama Hindu di Kabupaten Lampung Tengah dalam 5 (lima) tahun terakhir tidak menunjukkan hasil yang mengembirakan. Hal ini dinyatakan oleh tokoh Parisada, ketua adat, guru-guru Agama Hindu, dan hal ini dibenarkan oleh beberapa legislator Hindu yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Faktor penyebab terjadinya situasi dan kondisi tersebut menurut legislator Hindu diakibatkan oleh kurang adanya koordinasi yang baik antara Parisada, ketua adat, guru-guru Agama Hindu, dan mahasiswa Hindu dengan legislator Hindu yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *kualitatif* yang telah peneliti laksanakan selama beberapa bulan yang telah berlalu.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan 6 (enam) orang legislator Hindu yang merepresentasikan pandangan 9 (sembilan) orang legislator Hindu di Kabupaten Lampung Tengah ditambah dengan keterangan para tokoh Parisada, ketua adat, dan guru-guru Agama Hindu dapat disimpulkan, bahwa dalam 5 (lima) tahun terakhir kontribusi legislator Hindu terhadap pengembangan pendidikan Agama Hindu terutama pengangkatan PNS guru Agama Hindu di wilayah Kabupaten Lampung Tengah dirasakan belum signifikan, walaupun dalam bidang-bidang lain seperti bantuan pembangunan pura, bantuan pembangunan Kantor Parisada, bantuan untuk festival *ogoh-ogoh*, dan bantuan pengembangan ekonomi kerakyatan telah berhasil dilaksanakan oleh para legislator Hindu yang ada di Kabupaten Lampung Tengah.

Kata kunci: Kontribusi legislator Hindu, pendidikan Agama Hindu, Kabupaten Lampung Tengah.

PENDAHULUAN

Pancasila adalah landasan ideal yang menjadi *way of life* Bangsa Indonesia, sedangkan Undang-Undang Dasar menjadi sumber dari segala sumber hukum. Pada Pancasila juga terdapat "*Sasanti Bhinneka Tunggal Ika*" yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Bertitik tolak dari semboyan tersebut sesungguhnya Indonesia tidak mengenal dikotomi antara kaum mayoritas dan minoritas karena semua warga negara mempunyai hak yang sama dihadapan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa "segala warga negara bersamaan

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Namun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kenyataannya telah muncul fenomena sosiologis dimana terjadi kondisi ironistik yang jauh berbeda dari yang diharapkan. Ketidaksesuaian "*das sein and das sollen*" dalam praktik kehidupan sosial, akhirnya menjadi teori pembenar bahwa suatu kondisi sosial akan sangat berbeda dengan apa yang direncanakan, yang mengakibatkan munculnya kesenjangan sosial dalam praktik-

praktik kehidupan di masyarakat. Apabila hal ini terjadi, maka espektasi atau harapan umat Hindu terhadap legislator Hindu tidak dapat terwujud dengan baik.

Diantara semua praktik-praktik sosial dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat yang meliputi bidang ideologi, bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang pertahanan, dan bidang keamanan, peneliti mengamati bahwa bidang politik memiliki peranan yang cukup besar dan mampu mempengaruhi strategi kebijakan pemerintah, dalam hal ini khususnya Pemda Kabupaten Lampung Tengah. Terhadap sistem kehidupan masyarakat termasuk masalah pendidikan yang menjadi bagian dari bidang sosial budaya. Oleh karena itu, motivasi para legislator harus dimulai dari karakteristik yang jujur, sungguh-sungguh, dan bermoralitas sehingga apa yang menjadi cita-cita yang telah disampaikan kepada masyarakat sedapat mungkin akan dapat tercapai sebagai implikasi dari karakteristik yang telah diuraikan di atas.

Jabatan legislator yang diemban oleh para politisi tersebut, baru tahap awal dari perjuangannya sebagai wakil rakyat, untuk berusaha semampu dan semaksimal mungkin dalam memperjuangkan hak-hak dan kepentingan masyarakat dalam rangka mencerdaskan bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Untuk dapat mencerdaskan bangsa, peranan politisi sebagai legislator sangatlah besar, karena legislator adalah penentu kebijakan dibidang anggaran pembangunan, termasuk anggaran pendidikan. Selain sebagai penentu kebijakan anggaran pembangunan (*budgeting*), legislator juga memiliki

tugas dan wewenang melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran pembangunan dan menyerap aspirasi rakyat sebagai wujud *controlling* dan pengawasan dibidang anggaran tersebut.

Kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan, legislator seyogyanya memiliki kemauan politik (*good will*) untuk sejak dini merancang pengajuan penganggaran di bidang pendidikan, khususnya dalam penganggaran pembangunan pendidikan Hindu di Kabupaten Lampung Tengah. Tentu hal ini harus disesuaikan dengan aspirasi yang diserap dari masyarakat (umat Hindu) yang ada di daerah pemilihannya. Sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi para legislator Hindu yang mungkin lolos dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2009, bahwa dalam periode masa jabatan DPRD yang ada di Kabupaten Lampung Tengah (tahun 2004-2009 dan 2009-2014), khusus untuk guru Agama Hindu hanya dapat diperjuangkan untuk diangkat sebagai PNS guru Agama Hindu yaitu 1 (satu) orang di SMA Negeri 01 Seputih Raman. Apabila dibandingkan dengan jumlah anggota DPRD yang menjadi wakil dari umat Hindu di kursi dewan, jumlah ini sangatlah irasional atau kontribusi yang dilakukan sangat kurang untuk kepentingan pendidikan Agama Hindu.

Untuk dapat menyerap aspirasi ini para legislator hendaknya mampu menyerap berbagai permasalahan dibidang pendidikan terutama pendidikan Agama Hindu, serta memberi jalan keluar terhadap semua permasalahan dihadapi masyarakat yang berkaitan dengan sarana pendidikan Agama Hindu, program bantuan pemberian honor guru-guru

pasraman, dan bila mungkin setiap tahun berusaha memperjuangkan kuota guru Agama Hindu dan guru honor daerah, karena hal ini merupakan hak dari rakyat terutama umat Hindu. Selain itu, legislator hendaknya juga memperjuangkan melalui forum-forum yang ada di DPRD, tentang bantuan pembangunan sarana pendidikan seperti: sekolah SD, SMP, dan SMA yang berbasis Hindu yang telah dirintis oleh tokoh-tokoh umat Hindu dan tokoh masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Tengah.

Semua permasalahan yang diuraikan tersebut haruslah segera dicarikan solusi, sehingga permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dapat ditangani secara konseptual dan komprehensif. Hal ini tentu peranan politisi sebagai legislator menjadi strategis untuk membangkitkan motivasi aparat birokrasi sehingga kontribusi dari para legislator di Kabupaten Lampung Tengah dapat dirasakan oleh umat Hindu dalam menghadapi masalah-masalah sosial di masyarakat. Untuk mendalami peranan politisi sebagai legislator dalam memberikan kontribusi terhadap pendidikan Agama Hindu, maka peneliti akan melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut di atas, yang hasilnya akan peneliti tuangkan dalam karya tulis ilmiah (skripsi) yang berjudul "Analisis Kontribusi Legislator Hindu terhadap Pendidikan Agama Hindu di Kabupaten Lampung Tengah".

METODE PENELITIAN

Proses penelitian ini akan dilaksanakan dengan menggunakan

metode penelitian *kualitatif*, karena data-data yang diperoleh akan diuraikan dan dirangkum oleh peneliti dalam bentuk kalimat-kalimat yang rinci dan spesifik untuk memberikan penjelasan secara *deskriptif*. Peneliti berupaya memecahkan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta yang didapatkan berupa hasil wawancara serta gambar-gambar pendukung yang sesuai dengan penelitian. Penggunaan metode ini dalam penelitian, dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimanakah kontribusi dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh legislator Hindu dalam mengembangkan pendidikan Agama Hindu di Kabupaten Lampung Tengah. Pada konteks penelitian yang akan dilakukan, peneliti haruslah mengandalkan teknik-teknik kualitatif, seperti wawancara, observasi, pengukuran, dokumen, rekaman, dan indikasi non-verbal (Yanuar Ikbar, 2012: 164).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Kontribusi Legislator Hindu terhadap Pendidikan Agama Hindu

a. Peranan Legislator Hindu

Salah satu tugas dan tanggungjawab yang harus dilakukan oleh legislator Hindu adalah meningkatkan fungsi dan peranan dalam mencerdaskan bangsa melalui pengembangan pendidikan, khususnya pengembangan pendidikan Agama Hindu. Generasi muda Hindu sebagai ujung tombak pembangunan, perlu diberikan dorongan, motivasi agar berperan aktif membantu pemerintah daerah dalam pengembangan pendidikan,

khususnya yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Kontribusi yang diharapkan dari para legislator Hindu yang ada di Lampung Tengah berupa bantuan materi dan tindakan nyata dalam rangka membantu tokoh-tokoh umat Hindu dan para pendiri pasraman Hindu yang ada di Lampung. Selain pengembangan sarana pendidikan Hindu, pengembangan SDM Hindu juga sangat penting diprioritaskan, karena berdasarkan data yang diperoleh dari umat Hindu, selama 2 periode, yaitu periode tahun 2004-2009 dan 2009-2014, guru Agama Hindu yang diangkat hanyalah 1 (satu) orang pada tahun 2009. Kondisi inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan *research* kontribusi legislator Hindu dalam pengembangan pendidikan Hindu di wilayah Lampung Tengah.

Apa yang diharapkan dari para legislator Hindu ini akan dapat diwujudkan melalui kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh legislator Hindu sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya sebagai anggota dewan, seperti penetapan peraturan dibidang anggaran pendidikan kemudian melakukan *controlling* atau pengawasan sampai pada sasaran yang dituju. Pada pembahasan penelitian ini, peneliti akan menguraikan hasil penelitian yang dilakukan terhadap para legislator Hindu tentang fungsi dan perannya selama menjadi anggota DPRD di Kabupaten Lampung Tengah. Sampel yang akan diuraikan dibatasi hanya pada legislator Hindu periode 2009-2014.

Keterangan *Nyoman Suryana* sebagai salah satu anggota DPRD Lampung Tengah dari Fraksi Golkar memberikan keterangan, bahwa menurutnya selama periode tahun 2009-2014 legislator Hindu di

Kabupaten Lampung Tengah sebenarnya sudah berupaya maksimal memberikan kontribusi di bidang pendidikan Agama Hindu melalui pengajuan proposal, tetapi upaya yang dilakukan itu hanya sebatas memberikan bantuan untuk pembangunan pura saja, sedangkan untuk pengembangan pasraman sebagai basis pendidikan Hindu dan pengangkatan guru Hindu belum berhasil diperjuangkan di Kabupaten Lampung Tengah. Selaku anggota DPRD Lampung Tengah *Nyoman Suryana* yang duduk di Komisi-II Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Dana Usaha dari Partai Golkar menyatakan sebagai berikut:

Bahwa pemberian bantuan sosial kepada umat Hindu setiap tahunnya tidak kurang dari Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dana tersebut dialokasikan 35% untuk umat Hindu dan sisanya 65% dibagi secara proporsional untuk pembangunan pura seperti; Pura Tri Kahyangan, Pura Dadya, dan rangkaian kegiatan keagamaan. Selain bantuan pembangunan pura, Pemda Lampung Tengah juga memberikan dana bantuan untuk membangun Kantor Parisada Lampung Tengah, tujuannya adalah untuk meningkatkan *sraddha* dan *bhakti* umat Hindu. Dalam bidang pendidikan, legislator sulit untuk memperjuangkan penambahan dan pemerataan guru-guru Agama Hindu, karena para pimpinan Parisada Kecamatan tidak segera menyerahkan data jumlah siswa Hindu yang ada di wilayahnya masing-masing, sehingga legislator menemui kesulitan memperjuangkan guru Agama Hindu, (Wawancara-*Nyoman Suryana*, 26 Juni 2014).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa

legislator Hindu di Kabupaten Lampung Tengah telah memberikan kontribusi dan perannya sebagai wakil umat Hindu di wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Kontribusi yang diberikan adalah mengusahakan bantuan dalam bentuk pembangunan pura yang berorientasi pada peningkatan *sraddha* dan *bhakti*. Dalam memperjuangkan pengangkatan guru Agama Hindu, *Nyoman Suryana* secara eksplisit menyatakan bahwa kurang adanya kerjasama antara para legislator Hindu dengan Parisada, misalnya tidak ada penyampaian data mengenai jumlah siswa dan guru Agama Hindu yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, sehingga para legislator Hindu kesulitan mencari alasan, dalam pengusulan pengangkatan guru Agama Hindu di Lampung Tengah.

Terkait dengan kontribusi legislator Hindu di Kabupaten Lampung Tengah, *Made Rimbawa Putra* Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari Fraksi PDI Perjuangan menyatakan, bahwa membenarkan legislator Hindu Kabupaten Lampung Tengah telah mengusahakan bantuan sosial untuk pembangunan pura yang ada di Lampung Tengah dengan pernyataan sebagai berikut:

Kegiatan keagamaan seperti *pemlaspasan* dan pembangunan pura dibantu melalui *Bansos* yang diajukan melalui proposal-proposal. Pura Puseh di SB-15 mendapat dana pembangunan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan bantuan dana juga diberikan untuk pembuatan Balai Pawedan di Pura Balai Agung. Pemberian bantuan selama ini baru dipergunakan untuk pembangunan

pura, sedangkan pemberian bantuan untuk pendidikan Agama Hindu diberikan untuk kegiatan *Jnana Dharma* Universitas Lampung melalui pengajuan proposal. Seharusnya untuk masalah pendidikan Agama Hindu harus mempunyai kuota 4-5 atau empat sampai lima orang yang diangkat PNS sebagai guru Agama Hindu setiap tahunnya oleh Bupati Lampung Tengah. Lalu mengapa hal ini tidak mampu diperjuangkan? Karena peran politik para legislator Hindu belum maksimal dan tidak ada dialog antara legislator Hindu, Parisada dan mahasiswa Hindu di Lampung untuk bersama-sama membicarakan upaya-upaya yang dilakukan untuk mendorong perkembangan pendidikan Agama Hindu melalui penganggaran dana pendidikan. Legislator Hindu membutuhkan komunikasi yang intensif dengan kepentingan-kepentingan lembaga yang legalitasnya jelas untuk dapat memperjuangkan pendidikan Agama Hindu di Kabupaten Lampung Tengah. Selain bantuan dana untuk pembangunan pura, legislator Hindu juga mengupayakan bantuan dana untuk kegiatan seni dan budaya Bali yaitu *Festival Ogoh-ogoh* yang telah disepakati menjadi ikon Pentas Seni di Kabupaten Lampung Tengah (Wawancara–*Made Rimbawa Putra*, Sabtu 28 Juni 2014).

Berbeda dengan keterangan yang disampaikan *Nyoman Wenten* yang juga sebagai Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dengan jabatan sebagai Sekretaris Komisi-III yang membidangi Pembangunan dari Fraksi PDI Perjuangan, menyatakan sebagai berikut: Bantuan yang diusahakan oleh legislator Hindu kepada umat dipergunakan untuk

melaksanakan kegiatan keagamaan, seperti: pengadaaan pasraman. Kunjungan legislator Hindu dapat dilihat ketika adanya interaksi sosial dengan umat Hindu pada saat festival *ogoh-ogoh* berlangsung. Pemerintah pusat kurang memperhatikan umat Hindu khususnya di Kecamatan Seputih Banyak dalam hal pendidikan Agama Hindu baik formal maupun informal. Dalam pendidikan, dilihat dari jumlahnya guru Agama Hindu di Kabupaten Lampung Tengah masih kurang, karena anggarannya tidak mencukupi dalam sepuluh tahun terakhir. Seharusnya jumlah guru Agama Hindu disesuaikan dengan pertumbuhan penduduk umat Hindu. Kerjasama antara Parisada dengan Pembimas Hindu Lampung juga perlu ditingkatkan untuk lebih memperhatikan pendidikan Agama Hindu terutama pada pendidikan ditingkat dasar dan juga kepemilikan kitab suci yang dapat membantu umat Hindu meningkatkan *sraddha* dan *bhakti*. Selain kegiatan pasraman, legislator Hindu telah berhasil memperjuangkan adanya kegiatan perjalanan ke tempat-tempat suci seperti pura atau *tirtayatra* ke India setiap setahun sekali yang merupakan program dari Pemerintah Daerah (Wawancara-Nyoman Wenten, Sabtu 28 Juni 2014).

Senada dengan pandangan yang disampaikan Nyoman Wenten tersebut di atas, *Made Arka Putra Wijaya* selaku Wakil Ketua Komisi-III Bidang Pembangunan DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari Fraksi PDI Perjuangan, menyatakan sebagai berikut:

Upaya dalam pengembangan pendidikan Agama Hindu dengan menghidupkan kembali kegiatan pasraman dengan cara mencari

bantuan dana. Tenaga pendidik di pasraman bekerjasama dengan *Made Paramarta* yang pada saat ini menjadi guru Agama Hindu di Kalimantan, kondisi ini menyebabkan pasraman yang ada di Desa Restu Baru tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bantuan dana yang didapat juga digunakan untuk mendirikan Taman Kanak-kanak atau TK bernuansa Hindu di Desa Restu Baru 4, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah yang lengkap dengan fasilitas sarana/prasarana belajar. Selain kepedulian terhadap pendidikan informal, maka dukungan secara moril dan spirituil juga diberikan melalui kunjungan di SMPN 01 Rumbia dan SMAN 01 Rumbia yang ditunjukkan dengan pemberian dana secara suka rela atau *dana punia* dan *dharmawacana* ketika perayaan *Hari Raya Saraswati* dan *Sivaratri*. Kunjungan dilakukan dengan atau tanpa undangan dari pihak sekolah. Dalam upaya peningkatan spirituil juga dilakukan kegiatan pembinaan rohani atau *pesantian* sebulan sekali dengan beranggotakan 17 orang dan didampingi pendharmawacana sesuai permintaan. Selain di bidang pendidikan, dukungan juga diberikan di bidang pembangunan yaitu bantuan renovasi Pura Balai Agung sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan beberapa pura lainnya. Pemda juga membantu melalui Bansos atau Bantuan Sosial yang diberikan kepada masyarakat secara merata melalui setiap legislator yang ada di Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Pembangunan pura dan pengembangan pendidikan Agama Hindu bertujuan untuk meningkatkan *sraddha* dan *bhakti* umat Hindu serta

membangun moral dan mental agar generasi Hindu dapat menunjukkan kualitas dalam beragama walaupun sebagai agama minoritas (Wawancara–*Made Arka Putra Wijaya*, Minggu 29 Juni 2014).

Upaya yang dilaksanakan legislator Hindu sebagaimana dinyatakan *Nyoman Wenten* dan *Made Arka Putra Wijaya* adalah kegiatan nyata yang manfaatnya dapat dirasakan umat Hindu melalui pembangunan sekolah TK benuansa Hindu, kegiatan pasraman dan kumpulan bersama atau *pesantian* secara bergantian antar umat Hindu. Selain itu, kedua legislator tersebut juga sering mengadakan kunjungan ke kantong-kantong Hindu yang menjadi pendukungnya, hal ini dilakukan atas inisiatif diri sendiri untuk dapat melihat bagaimana perkembangan dan apa permasalahan yang dihadapi oleh guru Agama Hindu dan siswa di sekolah terutama umat Hindu yang berada di Desa Restu Baru. Bantuan juga diberikan untuk pembangunan pura agar *sraddha* dan *bakti* dalam meningkatkan moralitas umat Hindu.

Dalam wawancara yang dilakukan terhadap *Nyoman Sukedana* selaku Anggota DPRD Lampung Tengah Komisi-I Bidang Hukum, Pemerintahan, Perizinan, dan Pertanahan dari Fraksi Partai Golkar, ia menyatakan:

Bantuan dalam bentuk dana pernah diberikan untuk kegiatan pembuatan *ogoh-ogoh* di Desa Joharan. Selain itu bantuan dalam bentuk bangku dan meja guru juga diberikan untuk SD Negeri 01 Joharan. Kegiatan seperti pasraman pernah diadakan dengan menggunakan fasilitas belajar SMA yang ada di Desa Joharan tetapi sampai sekarang rutinitas belajar di

pasraman belum dapat berjalan efektif. Peningkatan kegiatan agama juga telah diupayakan, dengan mengusaha kan bantuan kegiatan *tirtayatra* ke India untuk para legislator Hindu. Walaupun demikian, kontribusi yang dilakukan oleh legislator Hindu terhadap pendidikan Agama Hindu masih belum maksimal, karena bantuan dana khusus untuk pendidikan Agama Hindu jarang diberikan dan pengangkatan PNS guru Agama Hindu di Kabupaten Lampung Tengah masih sangat sedikit. Selain itu para legislator Hindu belum maksimal untuk melayani umat Hindu khususnya di bidang pembuatan buku atau akta nikah. Pemda Kabupaten Lampung Tengah pernah memberikan bantuan dana melalui Bansos pembangunan tempat ibadah yang menjadi satu dengan bantuan masjid, pura, gereja (Wawancara–*Nyoman Sukedana*, Minggu 29 Juni 2014).

Keterangan yang disampaikan *Nyoman Sukedana* selaku anggota DPRD Lampung Tengah mungkin benar, tetapi sebagai legislator Hindu ia belum mampu mengusahakan pengangkatan guru-guru Hindu, yang jauh dirasakan lebih penting dari apa yang telah diperbuat oleh para legislator. Pengangkatan PNS guru Agama Hindu dirasakan sangat strategis, karena mereka para sarjana Agama Hindu adalah duta-duta agama yang akan mendidikan umat Hindu dalam membangun etika dan moral bangsa. Bansos yang telah dialokasikan untuk kepentingan pembangunan pura, kegiatan seni budaya (*ogoh-ogoh*) dan bantuan sarana/prasarana pendidikan TK, juga merupakan upaya yang sangat baik, hal itu juga sangat berarti bagi umat Hindu,

tetapi akan jauh lebih berarti dan bermakna apabila para legislator Hindu mampu dan berhasil mengusahakan agar lulusan STAH Lampung yang menjadi duta-duta dharma tersebut dapat diangkat sebagai PNS guru Agama Hindu di wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Kesimpulan dari keterangan *Nyoman Sukadana*, bahwa ia sudah berbuat secara maksimal untuk umat Hindu, tetapi dalam pengembangan pendidikan Agama Hindu, apa yang telah diperbuat tersebut belum dapat dirasakan oleh umat, karena Bansos yang diupayakan tersebut belum maksimal, terutama dalam pengembangan pasraman-pasraman Hindu dan pelayanan pembuatan buku atau akta nikah masih sulit didapatkan oleh umat Hindu.

Pandangan *Made Ardhana* selaku Ketua Badan Legislasi DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari Partai PDI Perjuangan, dalam keterangannya menyatakan sebagai berikut: Sekolah dan pasraman menjadi tempat berkembangnya pendidikan Agama Hindu. Pemberian bantuan diberikan kepada Pasraman Widya Dharma yang berdiri sejak tahun 2010. Dukungan kegiatan lainnya seperti *Jnana Dharma* Universitas Lampung sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan harapan suatu saat mahasiswa Hindu dapat mandiri melalui usaha peralatan buku tulis dan koperasi agar tidak lagi mencari dana melalui proposal-proposal. Perhatian di sekolah ditunjukkan dengan memberikan DAK atau Dana Alokasi Khusus dan pengawasan pada waktu pelaksanaan Ujian Nasional di SMP Negeri 01 Seputih Mataram, SMP Negeri 02 Seputih Mataram, SMA Negeri 01 Seputih Mataram, dan SMA Pangudi Luhur.

Selain bantuan untuk sekolah yang bersifat umum, legislator Hindu juga telah berhasil menjadikan festival *ogoh-ogoh* sebagai bentuk perkembangan seni budaya Bali dan mendirikan Kantor Parisada di Desa Rama Dewa Kabupaten Lampung Tengah. Legislator tidak bertindak sebagai eksekutor, oleh karena itu peran politik yang sudah dilakukan untuk memberikan bantuan kepada umat Hindu belum maksimal karena tugas legislator adalah melakukan pengawasan, kebijakan mengenai anggaran dan membuat peraturan (*Wawancara-Made Ardhana*, Senin 30 Juni 2014).

Keterangan *Made Ardhana* legislator Hindu dari Fraksi PDIP hampir senada dengan keterangan yang disampaikan *Nyoman Suryana* dari partai Golkar. Intinya para legislator Hindu belum bisa berbuat banyak untuk umat, apalagi dalam memperjuangkan kuota pengangkatan PNS guru Agama Hindu, baginya sangat sulit. Menurutnya, bantuan sosial khusus untuk pendidikan Agama Hindu masih belum terlaksana, karena selama ini bantuan yang diberikan ke sekolah-sekolah masih bersifat umum. Sepengetahuan *Made Ardhana* bantuan untuk pendidikan di pasraman pernah diberikan oleh Pemda atas usaha dari legislator Hindu.

Budiardjo dalam bukunya "Dasar-dasar Ilmu Politik" yang menyebutkan fungsi badan legislatif yang paling penting adalah menentukan kebijakan (*policy*) dan membuat undang-undang serta mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga agar semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan (*scrutiny, oversight*).

Selain berperan sebagai *legislasi dan control*, badan legislatif mempunyai beberapa fungsi lain yaitu peran *edukatif* dan *training ground*. Edukatif adalah legislatif yang bertindak sebagai pembawa suara rakyat dan mengajukan beraneka ragam pandangan yang berkembang secara dinamis dalam masyarakatnya. Sedangkan *training ground* merupakan sarana rekrutmen politik bagi generasi muda untuk mendapat pengalaman di bidang politik sampai ke tingkat nasional.

Berpijak pada teori yang dikemukakan *Budiharjo* seharusnya para legislator Hindu di Lampung Tengah harus terus berupaya memperjuangkan aspirasi umat Hindu dalam pengembangan pendidikan Agama Hindu, melalui kewenangannya sebagai pembuat kebijakan (*policy*), yang juga dapat membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak pada pengembangan pendidikan Agama Hindu di Lampung Tengah, karena hanya melalui kebijakan anggaran itulah para legislator dapat berbuat dan melakukan *bargaining* dengan *eksekutif* agar pengangkatan PNS guru Agama Hindu dapat diwujudkan. Demikian juga dengan adanya fungsi *legislasi* dan *edukatif* yang dimiliki, haruslah ada *good will* dari para legislator Hindu, untuk mencari tahu dan mendengar permasalahan-permasalahan yang dihadapi umat Hindu dan kemudian disampaikan di forum rapat Dewan yang terhormat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap para legislator tersebut di atas, ada dua pemahaman yang dapat ditarik sebagai hasil dari penelitian tersebut adalah; *pertama*, sebagian legislator

Hindu adalah menyadari bahwa mereka belumlah berbuat secara maksimal dalam pengembangan pendidikan Hindu di Lampung Tengah seperti yang dikemukakan oleh *Made Arimbhawa Putra*, *Made Ardhana*, *Nyoman Wenten*, dan *Nyoman Sukadana*. Mereka juga menyatakan bahwa apa yang telah diperbuatnya untuk umat Hindu, hanya sebatas mengusahakan bantuan sosial melalui proposal yang diajukan umat Hindu untuk kepentingan pembangunan pura, festival *ogoh-ogoh*, pembangunan Kantor Parisada Kabupaten Lampung Tengah, bantuan pembangunan TK Hindu, dan bantuan sosial untuk Pasraman Widya Dharma. Bantuan tersebut hanya bantuan sosial yang sifatnya insidental dan tidak menjadi bantuan rutin setiap tahun yang harus diterima umat Hindu, kecuali bantuan untuk pembangunan pura.

Disisi lain ada sebagian anggota legislator Hindu yang merasa dirinya sudah berbuat banyak untuk umat Hindu yang selama ini mendukungnya menjadi anggota Dewan, seperti yang disampaikan oleh *Nyoman Suryana* dan *Made Arka Putra Wijaya*. Mereka mengklaim telah berbuat maksimal untuk umat Hindu, dan juga mengatakan bahwa ketidakberdayaan mereka dalam memperjuangkan guru-guru Agama Hindu untuk diangkat menjadi PNS, disebabkan oleh kurang adanya koordinasi antara Parisada, legislator, guru-agama Hindu dan mahasiswa. Mereka menganggap semuanya berjalan sendiri tanpa koordinasi.

Selain itu, umat Hindu masih sulit untuk mendapatkan buku atau akta nikah, karena kurangnya

perhatian Parisada terhadap permasalahan yang sesungguhnya penting diperjuangkan. Akibat dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas, maka perhatian para sarjana Hindu terhadap siswa pasraman cenderung menurun, yang mengakibatkan beberapa pasraman tidak melakukan kegiatan pembelajaran secara rutin, karena tidak adanya guru pasraman yang mengajar. Permasalahan yang telah diungkapkan tersebut hendaknya segera dapat dipecahkan oleh para pemimpin umat dan para legislator Hindu dengan cara membangun kerjasama dan komunikasi yang intensif antara legislator Hindu dengan tokoh Parisada, tokoh adat, guru-guru Agama Hindu, dan mahasiswa Hindu serta semua komponen dan starata yang ada di lingkungan umat Hindu untuk bersama-sama memperjuangkan pengembangan pendidikan Hindu di masa mendatang.

Untuk mewujudkan harapan akan kemajuan pendidikan Hindu di masa mendatang, legislator Hindu harus mempunyai kekuatan dalam pelayanan terhadap masyarakatnya, sebagai pandangan yang dikemukakan oleh *Robert K.Greenlaf* dalam buku berjudul "Menjadi Pemimpin Politik" yang menyatakan bahwa kepemimpinan pelayanan adalah suatu kepemimpinan yang berawal dari perasaan tulus yang timbul dari dalam hati dan berkeinginan untuk dapat melayani, yaitu untuk menjadi pihak pertama yang melayani (*M.Alfan Alfian*, 2009: 88).

Mengacu kepada pandangan yang dikemukakan oleh *Robert K.Greenlaf* di atas, maka apa yang dilakukan oleh para legislator Hindu di Lampung Tengah dalam

memberikan kontribusi terhadap pendidikan Agama Hindu masih belum maksimal. Hal ini terbukti dengan hasil wawancara dari para legislator Hindu, dimana ada sebagian dari mereka menyatakan, bahwa legislator Hindu di Lampung Tengah masih belum berhasil memperjuangkan pengangkatan PNS guru-agama Hindu sebagai wujud dari kontribusinya dalam pengembangan pendidikan Hindu di Lampung Tengah.

b. Klaim Kegiatan Legislator Hindu di Masyarakat

Dalam *point* ini yang akan diuraikan oleh peneliti adalah *statement* para legislator Hindu Lampung Tengah terhadap kegiatan lapangan yang dianggap sebagai kontribusi legislator Hindu kepada masyarakat. Untuk menguji kebenaran dari *statement* yang diemukakan tersebut, maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan seperti: Ketua Parisada Kabupaten Lampung Tengah, beberapa guru-guru Agama Hindu, Ketua Pasraman Aditya Dharma, dan Bendesa Adat Desa Rama Dewa. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menguraikan sebagai berikut:

Ketua Parisada Lampung Tengah *I Ketut Nuryadi, S.E* ketika ditanya dalam suatu wawancara langsung yang dilaksanakan di rumahnya di Desa Rama Dewa Seputih Raman Lampung Tengah, menyatakan: Bahwa bantuan yang selama ini diklaim oleh legislator untuk diberikan kepada pasraman Aditya Dharma dan perbaikan pura Jagad Karana, oleh Ketut Nuryadi selaku Ketua Parisada, ia mengatakan tidak tahu secara pasti,

alasanya waktu itu ia belum menjadi Ketua Parisada. Menurutnya, Legislator Hindu yang sudah memberikan bantuan melalui pengurus adat atau pura untuk pembangunan Pura Jagat Krana yang ada di Desa Rama Dewa adalah Nyoman Suryana dan Made Bagiasa. Para legislator Hindu juga telah berhasil memperjuangkan berdirinya Kantor Parisada Kabupaten Lampung Tengah yang bertempat di Desa Rama Dewa dengan dana pembangunan sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Mengenai pendidikan Agama Hindu belum ada dorongan khusus dari para legislator Hindu kepada tenaga pendidik di sekolah maupun di pasraman agar menjadi guru negeri atau pegawai honor daerah di Kabupaten Lampung Tengah.

Formasi pengangkatan guru-guru PNS Pendidikan Agama Hindu khususnya di Kabupaten Lampung Tengah diinformasikan oleh Sugandi dan bahkan yang ikut berpartisipasi menginformasikan adalah Purworo yang notabene adalah umat Kristen. Selain itu, kontribusi lain yang sudah diberikan oleh para legislator Hindu adalah bantuan dana untuk kegiatan keagamaan, seperti: rangkaian pelaksanaan *melasti* dan *nyepi*, piodalan Pura Jagat Krana, serta penataran pemangku dan serati (Wawancara–Ketut Nuryadi, Minggu 20 Juli 2014)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi legislator Hindu berupa pembangunan Pura Jagat Krana dan Kantor Parisada Kabupaten Lampung Tengah di Desa Rama Dewa. Dorongan belum diberikan oleh legislator Hindu untuk berusaha memperjuangkan

pengangkatan PNS guru-guru pendidikan Agama Hindu, sedangkan bantuan yang sudah diberikan yaitu pemberian dana untuk kegiatan keagamaan seperti rangkaian pelaksanaan *melasti* dan *Nyepi*. Hasil wawancara membuktikan bahwa bantuan khusus pendidikan Agama Hindu, baik secara formal maupun informal belum dapat dilakukan dan bantuan yang selama ini diberikan sebatas untuk kegiatan keagamaan dan pembangunan pura. Pernyataan mengenai kontribusi legislator Hindu juga diperkuat dengan adanya pernyataan oleh *Ida Bagus Putu Suteja, S.Pd.H.*, selaku Bendesa Adat Desa Rama Dewa sebagai berikut: Legislator Hindu terutama DPRD Kabupaten Lampung Tengah periode 2009-2014 belum pernah memberikan bantuan untuk umat Hindu di Desa Rama Dewa. Selama ini, pembangunan *piasan* dan perbaikan *gedong* di Pura Dalem Desa Rama Dewa mendapat bantuan dari DPRD Provinsi Lampung yaitu I Komang Koheri, S.E. Mengenai pendidikan, dorongan untuk tenaga pendidik agar menjadi guru negeri di sekolah sudah pernah disampaikan oleh Drs. I Nyoman Suryana ketika *berdharma wacana* di Pura Jagatkrana. Melihat perjuangan para legislator Hindu terhadap pendidikan Agama Hindu dapat dikatakan belum maksimal, karena para legislator Hindu kurang dalam pembinaan dan masih sedikit guru-guru pendidikan Agama Hindu yang tidak segera diangkat menjadi PNS khususnya di Kabupaten Lampung Tengah, (Wawancara–*Ida Bagus Putu Suteja*, Jumat 8 Agustus 2014).

Pernyataan tersebut membuktikan bahwa kontribusi legislator Hindu belum maksimal termasuk dalam pembangunan pura

dan pendidikan Agama Hindu. Pembangunan pura di Desa Rama Dewa lebih mendapat perhatian dari DPRD Provinsi Lampung. Hanya beberapa legislator Hindu yang memberikan bantuan khususnya di Desa Rama Dewa.

Selain pernyataan dari Ketua Bendesa Adat Desa Rama Dewa, hasil wawancara mengenai kontribusi legislator Hindu juga dipertegas oleh *I Wayan Santra* selaku Ketua Pasraman Aditya Dharma Seputih Raman yang menyatakan sebagai berikut: Pasraman Aditya Dharma termasuk pasraman yang masih aktif dalam kegiatan pembelajaran khususnya di Kecamatan Seputih Raman. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran didukung oleh dana khas pasraman dan bantuan dari para donatur. Kontribusi legislator Hindu selama beberapa tahun terakhir belum ada yang secara nyata memberikan bantuan baik berupa uang atau pun material. Bantuan dari Pemda Kabupaten Lampung Tengah untuk pasraman sudah pernah diberikan tujuh tahun lalu sejumlah Rp.7.000.000,- atau tujuh juta rupiah. Bendahara pasraman bernama *Ida Bagus Ariaka, S.Ag.*, pernah dua kali meminta bantuan melalui pengajuan proposal kepada salah satu legislator Hindu yaitu *Drs. I Nyoman Suryana* tetapi tidak ada tanggapan apa pun. Kegiatan pasraman pernah mendapat kunjungan dari *Drs. I Nyoman Suryana* sewaktu beliau menjabat sebagai Ketua Parisada Kabupaten Lampung Tengah. Pasraman mempunyai visi dan misi untuk dapat mencerdaskan generasi Hindu dan menghidupkan kegiatan keagamaan untuk dapat meningkatkan *sraddha* dan *bhakti*. Melihat sudah ada perwakilan dari umat Hindu yang

menjadi DPRD Kabupaten Lampung Tengah, maka bantuan dana dan perhatian berupa kunjungan untuk kegiatan pasraman sangat dibutuhkan”, (Wawancara – *I Wayan Santra*, Minggu 20 Juli 2014).

Pernyataan dari *I Wayan Santra* tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sudah tujuh tahun terakhir tidak ada bantuan yang diberikan oleh legislator Hindu kepada pengurus Pasraman Aditya Dharma. Sosialisasi berupa kunjungan sudah dilakukan oleh salah satu legislator Hindu, tetapi saat beliau menjadi Ketua Parisada Kabupaten Lampung Tengah dan belum menjadi legislator Hindu. Bantuan berupa dana dan dukungan melalui kunjungan sangat diharapkan oleh pihak pasraman. Penelitian mengenai kontribusi legislator Hindu terhadap pendidikan, juga diperkuat dengan adanya pemaparan hasil wawancara oleh guru-guru Agama Hindu yang mengajar di beberapa sekolah khususnya wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Peneliti telah melakukan wawancara dengan *Ida Bagus Ariaka, S.Ag.*, selaku guru pendidikan Agama Hindu di SMP Negeri 02 Seputih Banyak yang memaparkan sebagai berikut: Legislator Hindu selama lima tahun kebelakang tidak pernah memberikan bantuan untuk SMP Negeri 02 Seputih Banyak dalam bentuk apa pun. Dukungan untuk memperjuangkan pengangkatan PNS pendidikan guru Agama Hindu juga belum pernah disosialisasikan kepada umat Hindu termasuk kepada guru-guru Agama Hindu yang honorer. Sehingga kontribusi legislator Hindu dirasa belum maksimal dalam memperjuangkan pendidikan Agama Hindu,

(Wawancara–*Ida Bagus Ariaka*, Minggu 20 Juli 2014).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa kontribusi legislator Hindu terhadap pendidikan Agama Hindu masih kurang, karena hampir tidak ada pengangkatan PNS untuk guru pendidikan Agama Hindu. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa salah satu legislator Hindu bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Seputih Banyak dan ternyata masih minimnya perhatian legislator Hindu terhadap pendidikan Agama Hindu di sekolah sekitar tempat tinggal. Pernyataan tersebut juga dipertegas oleh guru Agama Hindu yang mengajar di SDN 01 Mataram Ilir yaitu *Bawon Susanti, S.Ag.*, yang menyatakan sebagai berikut: Selama mengajar di SDN 04 Mataram Ilir tidak ada pemberian bantuan yang dilakukan oleh para legislator Hindu, bahkan legislator Hindu periode 2009-2014 tidak pernah melakukan sosialisasi dan dukungan khusus untuk pengembangan pendidikan Agama Hindu. Permasalahan mengenai sedikitnya formasi pengangkatan PNS guru pendidikan Agama Hindu khususnya di Kabupaten Lampung Tengah, menyebabkan kontribusi legislator Hindu terhadap pendidikan Agama Hindu belum terlihat dan mengarah dengan pasti, (Wawancara–*Bawon Susanti*, Minggu 20 Juli 2014).

Pemaparan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa legislator Hindu belum maksimal memberikan bantuan di bidang pendidikan Agama Hindu, karena kurang adanya sosialisasi terhadap sekolah dan guru-guru Agama Hindu. Hal ini membuktikan bahwa perhatian legislator Hindu untuk pendidikan Agama Hindu masih sangat

dibutuhkan baik di SD maupun SMP. Selain itu, pernyataan tersebut dipertegas oleh salah satu guru pendidikan Agama Hindu yang mengajar di SMP Negeri 02 Seputih Raman yaitu *I Wayan Suladra, S.Ag.*, yang menyatakan sebagai berikut: Pendidikan Agama Hindu khususnya di Kabupaten Lampung Tengah masih, membutuhkan perhatian yang mendalam dari berbagai pihak terutama para legislator. Legislator Hindu hampir tidak pernah memberikan sumbangsih terhadap perkembangan pendidikan Agama Hindu di SMP Negeri 02 Seputih Raman. Selama ini, hanya Drs. I Made Bagiasa yang sudah memberikan bantuan 60 kitab suci *Bhagawadgita* karya *G. Pudja MA. SH.*, pada saat kampanye menjelang pemilihan DPR RI. Bantuan yang diberikan oleh legislator Hindu masih kurang dari cukup, karena kitab suci tersebut dibagi untuk SMP Negeri 02 Seputih Raman sejumlah 40 kitab suci dan 20 kitab suci untuk SMP Negeri 01 Seputih Raman. Sebenarnya bukan hanya kitab suci yang dibutuhkan oleh para siswa tetapi sampai sekarang pihak sekolah SMP Negeri 02 Seputih Raman tidak mempunyai buku-buku pendidikan Agama Hindu yang berpedoman pada kurikulum 2013. Inisiatif untuk berkunjung ke sekolah pada waktu kegiatan pembelajaran dan keagamaan juga tidak pernah dilakukan oleh legislator Hindu. Para legislator Hindu selama ini masih mengedepankan bantuan untuk pembangunan pura seperti bantuan dana Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk Pura Jagat Karana, pembangunan balai kul-kul, balai bengong, dan Kantor Parisada Kabupaten Lampung Tengah yang bertempat di Desa

Rama. Pemda Kabupaten Lampung Tengah juga tidak memberikan bantuan khusus untuk umat Hindu, karena selama ini bantuan bersifat umum. Pada tahun 2013 Pemda Lampung Tengah memberikan bantuan untuk pengembangan ekonomi Desa Rama Nirwana secara umum sejumlah Rp.750.000.000,- atau tujuh ratus lima puluh juta rupiah (Wawancara–*Wayan Suladra*, Senin 21 Juli 2014).

Melihat fakta yang ada, maka perjuangan para legislator Hindu periode 2009-2014 dapat dikatakan belum maksimal karena bantuan terbesar yang diberikan Pemda masih memprioritaskan pembangunan pura dan pengembangan ekonomi masyarakat. Kabupaten Lampung Tengah pada periode tahun 2009-2014 pengangkatan PNS guru Agama Hindu nyaris tidak ada, walaupun ada sangat minim, berdasarkan data hanya 2 (dua) orang. Kondisi ini sangat memprihatinkan kita semua, seharusnya para legislator Hindu dan terpanggil hatinya untuk memperjuangkan guru Agama Hindu di Lampung Tengah.

Berdasarkan keterangan *I Wayan Suladra, S.Ag.*, maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi legislator Hindu masih diprioritaskan pada pembangunan pura. Sosialisasi melalui kunjungan legislator Hindu ke sekolah-sekolah belum pernah dilakukan, sedangkan sarana dan prasarana seperti buku pendidikan Agama Hindu dan kitab suci masih sangat dibutuhkan oleh guru dan siswa. Selain itu, tenaga pendidik masih sangat dibutuhkan karena tidak adanya kuota pengangkatan PNS guru pendidikan Agama Hindu di Kabupaten Lampung Tengah. Pernyataan tersebut dipertegas oleh *I Nyoman Mudiarto, S.Pd, M.M.*,

selaku guru pendidikan Agama Hindu di SMP Negeri 01 Rumbia yang menyatakan sebagai berikut: SMP Negeri 01 Rumbia sudah pernah diberikan bantuan oleh *Made Arka Putra Wijaya* berupa uang tunai sebesar Rp.300.000,- atau tiga ratus ribu rupiah dan beberapa bantuan dana untuk kegiatan keagamaan. Bantuan berupa material untuk pembangunan *pelinggih* dan *penyengker* juga pernah diberikan. Hanya *Made Arka Putra Wijaya* yang sudah mengunjungi sekolah ketika kegiatan keagamaan seperti *Hari Raya Saraswati* dan memberikan *dharma wacana* kepada generasi Hindu agar dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang bermutu walaupun sebagai umat beragama yang minoritas. Perjuangan legislator Hindu terhadap tenaga pendidik juga perlu ditingkatkan kembali, karena masih banyak guru-guru honorer dan guru yang belum mengajar harus berjuang sendiri untuk dapat diangkat menjadi PNS.

Selain legislator Hindu, Pemda Kabupaten Lampung Tengah sudah mengadakan kerjasama antara Unit Kesehatan Sekolah dan Puskesmas Kecamatan Rumbia agar warga sekolah yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Saat ini terdapat 50 buku-buku pendidikan Agama Hindu dan beberapa kitab suci Agama Hindu di sekolah yang sekarang diletakkan di perpustakaan sekolah. Jumlah tersebut masih sangat minim dari kebutuhan belajar yang ada, sehingga jumlah siswa sebanyak 124 orang belum dapat belajar dengan maksimal”, (*Wawancara–I Nyoman Mudiarto*, Senin 21 Juli 2014).

Hasil pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kontribusi legislator Hindu terhadap pendidikan Agama Hindu belum maksimal, karena dari sembilan legislator Hindu yang ada dan enam orang yang sudah diwawancarai hanya *Made Arka Putra Wijaya* yang sudah memberikan bantuan khususnya di SMP Negeri 01 Rumbia. Kontribusi yang dilakukan berupa pemberian dana pendidikan, material untuk tempat ibadah, dan interaksi melalui kunjungan langsung ke sekolah untuk memberikan dukungan agar para siswa terutama yang beragama Hindu menjadi manusia yang bermutu. Walaupun demikian perjuangan legislator Hindu menurut beliau dinilai belum maksimal, karena jumlah siswa lebih banyak dan tidak sesuai dengan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Pemaparan dari guru-guru pendidikan Agama Hindu mengenai kontribusi legislator Hindu juga diperkuat oleh *Ida Bagus Putu Suteja, S.Pd.H.*, selaku guru pendidikan Agama Hindu di SMP Negeri 01 Seputih Banyak yang telah memaparkan sebagai berikut: Sarana dan prasarana yang memadai sangat dibutuhkan guru dan siswa ketika pembelajaran berlangsung. Ketika pembelajaran pendidikan Agama Hindu, para siswa menggunakan buku-buku pendidikan Agama Hindu yang telah diberikan oleh Pembimas Hindu Provinsi Lampung yang keseluruhan berjumlah 30 buku. Selain buku-buku pendidikan Agama Hindu, sekolah juga diberikan kitab suci *Sarasamuscaya*, *Bhagawadgita*, dan *Atharwaveda*. Selama ini, belum ada bantuan dalam bentuk uang atau pun material dari para legislator Hindu. Bantuan untuk pembangunan pura sudah diupayakan oleh

legislator Hindu, tetapi bantuan untuk pengembangan pendidikan Agama Hindu belum maksimal diperjuangkan. Pengangkatan PNS guru pendidikan Agama Hindu ada di Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Way Kanan. Sudah beberapa tahun terakhir tidak ada pengangkatan PNS guru pendidikan Agama Hindu di Kabupaten Lampung Tengah dan sertifikasi untuk guru pendidikan Agama Hindu juga terbatas dengan adanya kuota.

Beberapa tahun terakhir terdapat Sekolah Menengah Pertama yang guru-guru pendidikan Agama Hindu sudah diangkat menjadi PNS yaitu SMP Negeri 01 Kota Gajah, SMP Negeri 01 Seputih Raman, SMP Negeri 02 Seputih Raman, SMP Negeri 01 Seputih Banyak, SMP Negeri 02 Seputih Banyak, SMP Negeri 02 Way Seputih, dan SMP Negeri 01 Rumbia. Jumlah pengangkatan PNS guru pendidikan Agama Hindu masih sangat dibutuhkan, mengingat pertumbuhan penduduk di Kabupaten Lampung Tengah tidak sesuai dengan jumlah guru pendidikan Agama Hindu yang tersedia. Permasalahan kurangnya tenaga pendidik seperti ini, seharusnya mendapat perhatian dari para legislator Hindu untuk dapat memperjuangkan dalam pembuatan kebijakan-kebijakan dan alokasi dana pendidikan”, (Wawancara – *Ida Bagus Putu Suteja*, Jumat 8 Agustus 2014).

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara dengan *Ida Bagus Putu Suteja, S.Pd.H.*, maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi legislator Hindu untuk pendidikan di tingkat SMP belum maksimal. Hal ini dikarenakan sudah beberapa tahun terakhir tidak ada

pengangkatan PNS guru pendidikan Agama Hindu di Kabupaten Lampung Tengah dan sertifikasi untuk guru pendidikan Agama Hindu masih terbatas. Pemaparan tersebut juga dipertegas oleh *I Made Suryawan, S.Ag.*, selaku guru pendidikan Agama Hindu yang mengajar di SD Negeri 03 Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak yang menyatakan sebagai berikut: Pendidikan menjadi pondasi penting dalam membangun Sumber Daya Manusia, terutama pembangunan moral dan karakter generasi muda melalui pendidikan Agama Hindu. Dalam proses pembelajaran di SD Negeri 03 Sanggar Buana, terdapat permasalahan seperti buku-buku pendidikan Agama Hindu yang masih sangat minim dan sudah tampak kusang, tidak ada alat peraga ketika belajar, dan kesalahan dalam pemberian soal-soal pelajaran Agama Hindu ketika ujian. Hal ini seharusnya dapat diperhatikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah, terutama perhatian melalui bantuan para legislator Hindu.

Kenyataannya permasalahan tersebut sampai sekarang belum ada solusi yang jelas dan pasti. Tidak ada satu pun anggota legislator Hindu yang melakukan kunjungan untuk melihat keadaan sekolah atau pun guru dan para siswa. Para legislator Hindu kurang berkomunikasi untuk meningkatkan interaksi sosial dengan pihak sekolah, terutama guru-guru pendidikan Agama Hindu. Selain itu, penilik untuk pendidikan Agama Hindu bernama *Braja Sugandi* yang bertugas di Kemenag Gunung Sugih juga tidak pernah meninjau perkembangan dan permasalahan yang terjadi di sekolah. Selama ini, sekolah selalu dibantu oleh Pemda

Kabupaten Lampung Tengah untuk merenovasi sekolah dan kegiatan peningkatan kesehatan melalui imunisasi setiap satu tahun sekali, (Wawancara—*I Made Suryawan*, Jumat 8 Agustus 2014).

Berdasarkan hasil wawancara dengan *I Made Suryawan, S.Ag.*, maka dapat disimpulkan bahwa SD Negeri 03 Sanggar Buana belum pernah mendapatkan bantuan dan kunjungan dari para legislator Hindu. Pengembangan pendidikan Agama Hindu juga terhambat, karena penilik untuk Agama Hindu yang bekerja di Kemenag Kabupaten Lampung Tengah tidak pernah melakukan peninjauan di Sekolah Dasar khususnya tempat beliau mengajar. Melihat beberapa permasalahan yang terjadi, maka kontribusi legislator Hindu belum maksimal terhadap pendidikan Agama Hindu.

2. Kebijakan Peraturan Legislator Hindu Terhadap Pengembangan Pendidikan Agama Hindu

Kebijakan legislator Hindu terhadap pengembangan pendidikan Agama Hindu di Kabupaten Lampung Tengah periode tahun 2009-2014, cenderung tidak terlihat dan belum menunjukkan perannya secara signifikan dalam pengembangan pendidikan Agama Hindu di masyarakat. Hal ini dapat terlihat pada data aktifitas legislator Hindu dalam memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pembiayaan sarana-sarana pendidikan Hindu di wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan dengan beberapa anggota DPRD yang beragama Hindu yaitu *Drs. I Nyoman Suryana* selaku Komisi-II Bidang Ekonomi,

Keuangan, dan Dana Usaha, sebagaimana telah peneliti uraikan tersebut di atas bahwa pemberian bantuan hanya sebatas bantuan sosial keagamaan untuk perbaikan Pura Jagad Krana dan pembangunan Kantor Parisada Kabupaten Lampung Tengah yang terletak di Kecamatan Seputih Raman. Hanya beberapa legislator Hindu yang memberikan bantuan untuk pengembangan pendidikan Hindu baik formal (sekolah) maupun informal (pasraman). Kurangnya kontribusi terlihat pada upaya legislator Hindu yang belum maksimal dalam memberikan sarana dan prasarana pendidikan, serta pengangkatan guru Agama Hindu negeri untuk wilayah Kabupaten Lampung Tengah.

Kebijakan-kebijakan yang ada menurut keterangan *Drs. Nyoman Suryana* masih bersifat umum dan menjadi satu dengan agama-agama lainnya dalam bentuk bantuan sosial atau Bansos yang pendistribusiannya dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah. Keterangan yang disampaikan *Drs. Nyoman Suryana* dibenarkan oleh legislator Hindu lainnya yaitu *Made Ardhana* selaku Ketua Badan Legislasi DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang memberikan pernyataan bahwa pada periode sebelumnya yaitu 2004-2009 di Kabupaten Lampung Tengah pernah diangkat guru Agama Hindu satu orang yang ditempatkan di SMA Negeri 01 Seputih Raman. Kebijakan ini menurut keterangan Parisada, tokoh adat, guru-guru Agama Hindu, dan pengurus Pasraman Aditya Dharma yang berada di Kabupaten Lampung Tengah sangatlah jauh dari harapan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan

dengan dengan beberapa sampel yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk memberikan data-data tentang kebijakan-kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah, maka hasilnya dapat peneliti uraikan sebagai berikut:

a. Kebijakan dalam Pengangkatan Guru Agama Hindu Negeri

Upaya yang dilaksanakan oleh para legislator Hindu belum mengarah dan maksimal dalam memperjuangkan tenaga pendidik. Pengangkatan guru Agama Hindu negeri masih jauh dari harapan, karena berdasarkan pernyataan beberapa legislator Hindu pada periode 2004-2009 hanya ada satu guru Agama Hindu yang sudah diangkat. Pada periode 2009-2014 hampir tidak ada pengangkatan guru Agama Hindu negeri untuk wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Hal ini juga diperkuat oleh salah satu anggota legislator Hindu yaitu *Made Rimbawa Putra, S.E.*, yang menyatakan sendiri bahwa perannya sebagai legislator Hindu belum maksimal dalam bidang pendidikan Agama Hindu. Bahkan ia pun menyatakan, seharusnya untuk masalah pendidikan Agama Hindu harus mempunyai kuota empat sampai lima (4-5) orang yang diangkat PNS sebagai guru Agama Hindu setiap tahunnya oleh Bupati Lampung Tengah.

Beberapa legislator Hindu bahkan tidak mengetahui jumlah guru Agama Hindu negeri yang sudah diangkat di Kabupaten Lampung Tengah. Para sarjana pendidikan Agama Hindu mencoba memperjuangkan sendiri untuk dapat diangkat menjadi guru Agama Hindu negeri. Hal ini terbukti dari hasil

wawancara dengan beberapa guru-guru Agama Hindu yang mengetahui bahwa pengangkatan guru Agama Hindu hampir tidak ada untuk wilayah Kabupaten Lampung Tengah, sedangkan pengangkatan guru-guru Agama Hindu negeri ada di wilayah Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Way Kanan. Kenyataan mengenai kurangnya pengangkatan guru Agama Hindu negeri, tentunya menjadi harapan bagi umat Hindu kepada para legislator Hindu agar dapat memperjuangkan pengangkatan guru Agama Hindu negeri untuk wilayah Kabupaten Lampung Tengah sesuai kebutuhan yang ada.

b. Kebijakan yang Berkaitan dengan Pembangunan Sekolah Hindu

Berdasarkan hasil wawancara dengan para legislator Hindu, bahwa upaya dalam pembangunan sekolah yang bersifat formal yaitu sekolah Taman Kanak-kanak atau TK benuansa Hindu di Desa Restu Baru 4, yang diupayakan oleh legislator Hindu bernama *Made Arka Putra Wijaya*. Bangunan tersebut lengkap dengan sarana dan prasarana dalam belajar. Selain beliau, belum ada yang mempunyai inisiatif untuk mendirikan sekolah karena bantuan yang diberikan untuk sekolah formal diberikan dalam bentuk dana ketika ada pengajuan proposal kegiatan keagamaan dari sekolah maupun universitas. Masih banyak yang perlu dibangun dalam bidang pendidikan Agama Hindu baik pembangunan fisik maupun mental. Oleh karena itu sudah seharusnya para legislator Hindu dapat bekerjasama untuk membangun sekolah benuansa Hindu, melihat kualitas pendidikan

Agama Hindu di sekolah formal perlu adanya peningkatan.

c. Kebijakan yang Berkaitan dengan Bantuan Pasraman

Bantuan pasraman di daerah-daerah masih sangat dibutuhkan, karena selama ini masih banyak pasraman yang hanya mengandalkan bantuan dari para donatur yang sifatnya suka rela memberikan dana untuk dapat mengadakan kegiatan keagamaan. Wawancara mengenai kontribusi legislator Hindu terhadap pendidikan Agama Hindu di pasraman (informal), menurut *I Wayan Santra* selaku Ketua Pasraman Aditya Dharma Desa Rama Gunawan Seputih Raman Lampung Tengah, bahwa bendahara pasraman bernama *Ida Bagus Ariaka, S.Ag.*, pernah dua kali meminta bantuan melalui pengajuan proposal kepada salah satu legislator Hindu yaitu *Drs. I Nyoman Suryana* tetapi tidak ada tanggapan apapun. Inisiatif untuk memberikan dana bantuan pendirian dan kegiatan pasraman juga tidak terlihat dari para legislator Hindu, karena dana akan diberikan apabila yang bersangkutan melakukan permohonan dana melalui proposal. Para legislator Hindu tentunya harus dapat melihat dan memahami untuk kemudian melakukan tindakan pasti, membantu memperbanyak kegiatan pendidikan Agama Hindu.

d. Kebijakan yang Berkaitan dengan Guru Honor Agama Hindu

Wawancara dengan para legislator Hindu mengenai tenaga pendidik, bahwa belum ada kebijakan mengenai guru honor Agama Hindu. Kontribusi yang dilakukan oleh beberapa legislator

Hindu mengenai guru honor yaitu hanya mendukung guru honor untuk segera diangkat menjadi guru Agama Hindu negeri. Bantuan legislator Hindu mengenai dana mengajar atau pun upaya melalui kebijakan tertentu untuk segera diangkat menjadi guru negeri belum pernah dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan *Made Arka Putra Wijaya* yang menyatakan, bahwa pasraman yang beliau sudah bentuk di Desa Restu Baru tidak dapat berkegiatan lagi karena pengajar pasraman bernama *Made Paramarta, S.Ag.*, tidak berkenan lagi mengajar di pasraman dan lebih memilih menjadi guru Agama Hindu di Kalimantan. Hal ini membuktikan bahwa pentingnya perhatian dari para legislator Hindu.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dana bantuan sosial yang diperjuangkan oleh para legislator Hindu hanya sebatas pada bantuan sosial yang dialokasikan untuk membangun pura dan kegiatan pentas seni budaya Bali. Hal ini membuktikan bahwa peran politik para legislator Hindu dalam pembangunan dan pengembangan pendidikan Hindu di Lampung Tengah belum ada, alasan yang dilontarkan sebagai pembenar oleh para legislator tersebut adalah tidak adanya koordinasi intensif antara Parisada, legislator, guru Agama Hindu dan mahasiswa Hindu yang ada di Lampung Tengah. Apabila Parisada dan para Legislator memiliki *Good Will* untuk sungguh-sungguh berniat memperjuangkan nasib lulusan sarjana pendidikan Agama Hindu di Lampung, tentu hal ini bukanlah pekerjaan yang sulit untuk dilakukan. Memang kedua komponen yang paling terhormat tersebut harus selalu berkoordinasi

dengan baik, duduk bersama membicarakan kepentingan umat, bukan mencari upaya untuk kepentingan sesuatu yang tidak terarah, apalagi membahas program mercusuar, dan para pemimpin umat dan tokoh politik ini hendaknya dapat merenungkan, apa yang sudah kuberikan kepada umat dan jangan hanya berpikir meminta dukungan umat semata, tetapi tidak pernah memperjuangkan kepentingan umat Hindu. Para pemimpin umat tentu tidak elok bila menyalahkan mahasiswa yang tidak memiliki kekuatan apapun, seharusnya para pemimpin yang terhormat itulah yang harus berjuang tanpa pammerih untuk umatnya, Tuhan maha tahu apa yang dilakukan umatnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan, untuk menjawab permasalahan yang telah diidentifikasi peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa legislator Hindu belum mampu berkontribusi secara signifikan terhadap pengembangan pendidikan Agama Hindu baik formal (sekolah) maupun non formal (pasraman) di Kabupaten Lampung Tengah. Terbukti dengan kurangnya peran legislator Hindu dalam memperjuangkan kuota pengangkatan PNS guru Agama Hindu, walaupun dalam pemberian bantuan sarana/prasarana pendidikan sekolah TK benuansa Hindu telah diberikan. Bantuan terbesar yang pernah diberikan yaitu bantuan perbaikan Pura Jagad Karana sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk umat Hindu, bantuan umum pengembangan ekonomi sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk Desa Rama Nirwana

Kecamatan Seputih Raman, bantuan pembangunan Kantor Parisada Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dan pembangunan sekolah TK

Kebijakan tentang peraturan daerah yang diperjuangkan oleh legislator Hindu memang ada, tetapi masih bersifat umum, dan belum ada kebijakan yang diperjuangkan berdampak secara langsung terhadap pengembangan pendidikan Agama Hindu baik formal (sekolah) maupun non formal (pasraman) di Kabupaten Lampung Tengah. Alasan yang disampaikan oleh para legislator Hindu, tidak adanya komunikasi yang intensif antara legislator Hindu, Parisada, tokoh adat, guru-guru pendidikan Agama Hindu.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, Alfian. Tahun 2009. *Menjadi Pemimpin Politik*. Penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama–Jakarta.
- Arikunto, Suharsini. Tahun 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Penerbit Rineka Cipta–Jakarta.
- Budiardjo, Miriam. Tahun 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama–Jakarta.
- Buku Lampung Tengah Dalam Angka 2013: Badan Pusat Statistik Lampung Tengah
- Bungin, Burhan. Tahun 2011. *Penelitian Kualitatif*. Penerbit Kencana Prenada Media Group–Jakarta.
- Gandhi, Teguh Wangsa. Tahun 2011. *Filsafat Pendidikan*. Penerbit Ar-Ruzz Media Yogyakarta.
- Hasbullah. Tahun 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada–Jakarta.
- Ikbar, Yanuar. Tahun 2012. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. Penerbit PT.Refika Aditama–Bandung.
- Imron, Ali. Tahun 2012. *Kebijakan Pendidikan di Indonesia*. Penerbit Bumi Aksara Jakarta.
- Iqbal, Hasan. 2002. *Metodelogi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia Jakarta.
- Marbun, B.N. Tahun 2002. *Kamus Politik*. Jakarta.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. Tahun 2013. *Metodelogi Penelitian*. Penerbit PT.Bumi Aksara–Jakarta.
- Noor, Juliansyah. Tahun 2011. *Metodelogi Penelitian*. Penerbit Kencana Prenada Media Group–Jakarta.
- Nugroho, Riant. Tahun 2008. *Kebijakan Pendidikan yang Unggul*. Penerbit Pustaka Belajar–Yogyakarta.
- Pudja, G. Tahun 2010. *Bhagavadgita (Pancama Veda)*. Penerbit Paramita–Surabaya.
- Seregig, I Ketut. Tahun 2010. *Nilai Keadilan Hukum Adat Bali*. Penerbit Paradigma Yogyakarta.
- Slamet, Santoso. 2010. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Penerbit PT. Refika Aditama Bandung.
- Sugiyono. Tahun 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta–Bandung.

